

**REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT SERVICES)**

**UNFPA 8th COUNTRY PROGRAMME (2011-2015)
PROGRAMME COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA
AND UNFPA**

Expressions of Interest

The Government of Indonesia through National Development Planning Agency (Bappenas) has received financing from the United Nations Population Fund (UNFPA) invites individual consultants who will be employed to Bappenas. The main tasks of assignments are to support daily activities of the program.

The Procurement Committee of Bappenas is now inviting skilled, highly committed and dedicated Indonesian professionals to be part of the project for the position:

1. Programme Officer for Programme Management (PO for PM) (1 person)

Qualifications :

- Minimum a Master Degree (S2) in demography, health, public policies or social studies
- Minimum 5 years working experience with Governments, UN Agencies and/or other International Donor Agencies
- Has Experience in project management at national level on population, health, public policies or other related sector
- Able to work in team, proven skilled in coordinating and building team network
- Strong verbal and written English communication skills

Expressions of interest (Curriculum Vitae) must be sent to the address below no later than March 18, 2014:

Procurement Committee of
Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency (Bappenas)

Gedung Madiun Lantai Basement,
Ruang Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa PHLN
Jalan Taman Suropati No 2, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Phone : (021) 31936207 ext. 3551 Fax : 31931392
e-mail : pengadaanphln@bappenas.go.id

Please indicate your preference (PO for PM) at the top of your CV

Jakarta, March 10, 2014

KERANGKA ACUAN
Programme Officer for Programme Management (PO for PM),
di National Programme Coordinating Unit/ NPCU
Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus – 8 (2011-2015)
Bappenas

I. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dan Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kependudukan (UNFPA) sedang melaksanakan program kerjasama siklus ke-8 pada tahun 2011-2015. Kerjasama tersebut membantu pemerintah Indonesia dalam pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMN, MDGs dan ICPD *Programme of Action* dalam bidang kependudukan dan pembangunan; kesehatan dan hak-hak reproduksi; dan kesetaraan gender.

Tahun 2011-2012 program dilaksanakan bersama-sama mitra pemerintah, lembaga non pemerintah dan UNFPA di tingkat pusat dan daerah. Mitra pemerintah tingkat pusat adalah Bappenas, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), Komnas Perempuan, dan KPAN. Sedangkan institusi non pemerintah meliputi Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) dan LSM. Mitra pemerintah tingkat daerah mencakup 10 kabupaten di 5 provinsi yaitu Provinsi Papua: Kabupaten Merauke dan Jayapura; Provinsi Papua Barat: Kabupaten Manokwari; Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Kabupaten Manggarai, Alor dan Timor Tengah Selatan (TTS); Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara; Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Tahun 2013-2015 CP8 mencakup 7 *outcome* dan 9 *output* dan dilaksanakan bersama-sama hanya dengan mitra pelaksana (pemerintah, lembaga non pemerintah) tingkat pusat dan UNFPA. Mitra pelaksana tingkat pusat adalah Bappenas, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), dan Komnas Perempuan, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Mulai tahun 2014 telah dikembangkan dan telah ditanda tangani *Project Document* (ProDoc) 2014-2015 per *output* sebagai acuan dasar pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014-2015.

Bappenas yang bertindak sebagai *Government Coordinating Agency (GCA)* bertanggung jawab dalam melakukan *monitoring* perkembangan dan pencapaian *outcome* dan *output* program. Dalam pelaksanaannya Bappenas akan memimpin tim pengarah nasional yang keanggotaannya terdiri dari pejabat eselon I mitra pemerintah dan ketua dari institusi non pemerintah, serta memimpin tim koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat eselon II mitra pemerintah dan ketua pelaksana harian mitra non pemerintah. Bappenas dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh satu orang staf ahli *National Programme Manager (NPM)*.

Untuk menjalankan tugas sebagai *National Programme Manager (NPM)*, yang mencakup pengelolaan aspek manajemen, teknis administratif termasuk keuangan, dan teknis substantif serta pengembangan kerangka pikir inovatif agar pelaksanaan kegiatan Siklus Ke -8/ *Country Programme-CP8* di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan seorang asisten NPM yang disebut *Programme Officer for Programme Management/PO for PM*, bertempat di *National Programme*

Coordinating Unit (NPCU). PO for PM bertanggung jawab membantu NPM dalam melaksanakan seluruh aktivitas yang terkait dengan *project management*.

- II. **Tempat tugas** : NPCU-Bappenas, Jakarta
- III. **Melapor dan bertanggung jawab kepada** :
Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas dan *Assistant Representative UNFPA* di Jakarta, melalui *National Programme Manager (NPM)* di NPCU.
- IV. **Tugas Utama** :
Koordinasi di bawah NPM, PO for PM bertugas mendukung efektifnya NPCU dan *Programme Management Implementation Support (PMIS-UNFPA)* dalam bekerjasama dengan *Programme Management Associate (PMA)-UNFPA*, *NPO Monitoring & Evaluasi-UNFPA* dan GCA/Bappenas, dalam pelaksanaan serangkaian aktivitas terkait dengan *project management* serta pengelolaan dan koordinasi program CP8 secara menyeluruh.

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu *National Program Manager / NPM* dalam hal :

1. Aktif terlibat dalam pengembangan dan implementasi perencanaan program, termasuk pengembangan *Annual Work Plan/ AWP*; serta menyiapkan TOR terkait kegiatan yang tercantum dalam AWP.
2. Membantu NPM dalam melaksanakan fungsi NPCU sebagai *focal point* GCA dalam koordinasi program antara UNFPA dan GCA, memastikan berfungsinya secara efektif mekanisme koordinasi dalam *Technical Working Group (TWG)* dan Tim Koordinasi Nasional, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program CP8, dan keterpaduan antar program CP8, di Mitra Pelaksana.
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi manajemen, rapat Tim Koordinasi Nasional, rapat Tim Pengarah, evaluasi tahunan, dan evaluasi akhir siklus, bersama mitra pelaksana dan UNFPA.
4. Membantu NPM dalam memastikan mitra pelaksana melakukan pertemuan TWG tiap kuartal untuk review laporan program dan keuangan kuartalan yang selanjutnya mitra pelaksana menyerahkan laporan kemajuan kuartalan tersebut kepada UNFPA dan GCA. Serta membantu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan memastikan tindakan pemecahan masalah yang diperlukan dibuat tepat waktu.
5. Berkoordinasi dengan *NPO Monitoring & Evaluasi* untuk memastikan fasilitas yang sesuai kepada mitra pelaksana dalam pemantauan kinerja dan kemajuan program tingkat pusat.
6. Membantu NPM dalam memantau kemajuan pelaksanaan program CP8 seluruh mitra pelaksana, melakukan kompilasi dan analisis laporan kuartalan seluruh mitra pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada UNFPA dan GCA/Bappenas, serta memastikan semua laporan yang diperlukan (*APR - Annual Work Plan Progress Report*, *FACE - Funds Authorized Certificate Expenditures*, *QWP-Quarterly Work Plan*, *SPR – Standard Progress Report*) dapat diserahkan tepat waktu dan berkualitas oleh mitra pelaksana kepada UNFPA dan GCA/Bappenas.
7. Membantu NPM dalam penyusunan dan analisis laporan tahunan pelaksanaan *Country Programme ke-8 (CP8)* dalam mencapai *output dan outcome* CP8 serta kontribusinya pada

pencapaian target pembangunan dalam RPJMN, MDGs dan ICPD PoA, untuk dilaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan UNFPA.

8. Membuat rencana kerja dalam setahun dan rutin mengkonsultasikan perkembangannya kepada NPM, serta membuat laporan tertulis pelaksanaan rencana kerja tersebut pada tengah dan akhir tahun kepada NPM yang ditembuskan kepada Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas.

V. Persyaratan :

1. Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 (lima) tahun dengan lembaga pemerintah, lembaga PBB/UN Agencies dan lembaga donor internasional.
2. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan proyek/program di tingkat nasional di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Kebijakan Publik atau bidang terkait lainnya.
3. Minimal Gelar *Master* (S2) di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Kebijakan Publik atau bidang terkait lainnya.
4. Memiliki kemampuan koordinasi dan kerja sama yang baik, dan dapat bekerja di dalam tim.
5. Kemampuan yang kuat untuk berkomunikasi dengan jelas baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris.